

Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya

Fathimathuz Zachra De Chaniago¹ Moody Rizqy Syailendra Putra²

Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: fathimathuz.205230300@stu.untar.ac.id¹ moodys@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Korupsi telah menjadi masalah sosial serius yang melanda Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, merambahkan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik di negara ini. Langkah-langkah dilakukan penegak hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi antara lain memberatkan sanksi untuk pelaku korupsi, menerapkan budaya anti-korupsi di masyarakat, dan lain lain akan pelaku korupsi di Indonesia masih banyak dan merajalela. Latar belakang korupsi di Indonesia adalah lemahnya pengawasan pada belanja modal daerah dan intervensi dari pihak lain. Indonesia memiliki sejarah panjang korupsi yang dapat ditelusuri hingga era kolonial. Praktik korupsi semakin meluas selama periode paska-kemerdekaan, dan korupsi menjadi semakin terintegrasi dalam budaya politik dan bisnis negara. Faktor historis ini telah mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap korupsi dan menciptakan norma sosial yang memudahkan praktik-praktik koruptif. Birokrasi sistem pemerintahan yang tidak jujur, kurangnya transparansi, dan minimnya akuntabilitas dalam sistem pemerintahan telah menciptakan lingkungan rentan terhadap tindakan koruptif. Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemaparan analisis terhadap faktor pendorong terjadinya tindakan korupsi, penelitian ini akan membahas dan melihat korupsi melalui salah satu kasus yang telah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus terdapat rakyat Indonesia adalah kasus korupsi BTS 4G yang melibatkan kominfo. Dalam kasus ini, terjadi dugaan korupsi dalam proyek pengadaan infrastruktur jaringan telekomunikasi 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Kasus korupsi BTS 4G ini merupakan contoh yang mencerminkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi di Indonesia.

Kata Kunci: Korupsi, KPK, BTS 4G, Kominfo



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Korupsi telah menjadi masalah sosial serius yang melanda Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, yang terjadi di hampir setiap lini kehidupan masyarakat. Fenomena ini telah mempengaruhi tidak hanya ranah politik, tetapi juga ekonomi dan aspek sosial lainnya. Meskipun telah ada berbagai usaha keras untuk memberantasnya, korupsi masih tetap menjadi ancaman nyata bagi kemajuan negara ini. Langkah-langkah yang diambil oleh penegak hukum Indonesia sejauh ini, mulai dari penegakan sanksi yang lebih tegas bagi pelaku korupsi hingga upaya mendorong budaya anti-korupsi di tengah masyarakat, telah dilakukan. Namun, nyatanya, pelaku korupsi di Indonesia masih merajalela.

Latar belakang korupsi di Indonesia sangatlah kompleks. Menelaah akar permasalahan ini menjadi suatu hal yang krusial untuk merancang strategi pemberantasan yang lebih efektif. Wicaksono & Prabowo (2022) menyoroti bahwa korupsi dalam lingkup pemerintahan Indonesia dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk lemahnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran untuk pembangunan daerah, terutama dalam belanja modal. Selain itu, intervensi dari pihak lain, seperti pengusaha atau vendor yang melakukan manipulasi kepada kepala daerah atau pejabat terkait, juga menjadi salah satu pemicu terjadinya praktik korupsi.

Korupsi di Indonesia adalah salah satu masalah yang sangat kompleks. Hal ini sering kali terkait dengan kelemahan sistem, kurangnya transparansi, dan rendahnya akuntabilitas dalam

pengelolaan keuangan negara. Selain itu, kultur patronase di mana jaringan kekuasaan dan pertemanan sering digunakan untuk kepentingan pribadi juga menjadi pemicu utama korupsi di berbagai tingkatan struktur pemerintahan. Dalam mengatasi korupsi, penting untuk tidak hanya fokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada penguatan sistem pengawasan dan transparansi dalam segala aspek pemerintahan. Langkah-langkah preventif seperti meningkatkan literasi anti-korupsi di semua lapisan masyarakat, penerapan teknologi untuk memantau pengelolaan keuangan negara, serta memperkuat lembaga pengawas independen, semuanya merupakan langkah yang penting untuk ditempuh. Selain itu, perlunya pembaharuan dalam struktur politik dan hukum juga menjadi aspek penting untuk memastikan penegakan hukum yang adil serta meminimalisir celah bagi praktik korupsi. Menciptakan sistem yang mampu mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintah akan menjadi kunci utama dalam memerangi korupsi secara efektif di Indonesia.

Indonesia telah mengalami riwayat panjang korupsi yang dapat ditelusuri hingga era kolonial. Sejak masa paska-kemerdekaan, praktik korupsi semakin merajalela, melekat erat dalam budaya politik dan bisnis negara. Sejarah panjang ini telah memberikan ciri tersendiri bagi persepsi masyarakat terhadap korupsi, bahkan menciptakan norma sosial yang memfasilitasi praktik-praktik koruptif. Sejarah korupsi yang terus berlanjut ini menjadi bagian integral dari dinamika sosial dan politik Indonesia. Peran faktor sejarah ini tidak dapat diabaikan. Lemahnya tata kelola pemerintahan, birokrasi yang bengkok, transparansi yang minim, serta rendahnya tingkat akuntabilitas dalam sistem pemerintahan menjadi pemicu utama bagi maraknya praktik koruptif. Sejumlah sektor, seperti perpajakan, pengadaan publik, dan perizinan bisnis, menjadi ajang yang paling rentan terhadap penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

Namun, korupsi tak hanya mencakup ranah sektor publik. Korupsi merembes ke sektor swasta di Indonesia. Keterlibatan perusahaan dalam praktik koruptif, mulai dari suap hingga nepotisme, telah menyusup dalam latar belakang korupsi. Dampaknya tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga mengganggu persaingan yang sehat dan inovasi di dunia bisnis. Dampak dari korupsi yang merajalela di Indonesia sangatlah merugikan masyarakat secara keseluruhan. Korupsi menghambat pembangunan sosial dan ekonomi, menciptakan kesenjangan yang semakin besar, dan menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga pemerintah. Hal ini menyebabkan efek negatif yang meluas dan mengganggu stabilitas serta pertumbuhan negara. Oleh karena itu, analisis dan juga pemahaman yang mendalam tentang latar belakang korupsi ini sangat penting untuk mengatasi masalah ini secara efektif dan berkelanjutan. Diperlukan upaya bersama dalam reformasi sistem, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan transparansi, serta penegakan hukum yang tegas. Selain itu, perlunya penguatan nilai-nilai integritas dan budaya anti-korupsi dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan bisnis guna membangun fondasi yang lebih kuat dalam memerangi korupsi. Hanya dengan upaya terpadu dan komprehensif, korupsi dapat diminimalisir, memberikan harapan untuk perubahan yang lebih baik bagi Indonesia. Rumusan Masalah: Bagaimanakah faktor-faktor utama yang menjadi pendorong penyebaran korupsi di Indonesia, termasuk dalam aspek budaya, ekonomi, politik, dan sosial? Bagaimanakah solusi konkret dapat dirumuskan dan diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia, dengan mempertimbangkan akar masalah yang telah diidentifikasi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian secara kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian

yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Sedangkan untuk menganalisis perkembangan pemikiran para ahli menggunakan metode deskriptif, menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dimana penulis mengumpulkan sumber-sumber tertulis baik jurnal, buku, maupun artikel. Menurut Sugiyono (2018), studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebelum membahas lebih lanjut tentang pemaparan analisis terhadap faktor pendorong terjadinya tindakan korupsi, penelitian ini akan membahas dan melihat korupsi melalui salah satu kasus yang telah terjadi di Indonesia. Salah satu kasus korupsi yang pernah menggemparkan rakyat Indonesia adalah kasus korupsi BTS 4G yang melibatkan kominfo. Dalam kasus ini, terjadi dugaan korupsi dalam proyek pengadaan infrastruktur jaringan telekomunikasi 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Republik Indonesia. Terdapat tuduhan bahwa sejumlah pejabat dan pihak terkait menerima suap dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dalam proses penentuan pemenang kontrak. Salah satu orang yang terlibat Johnny G. Plate (JGP) dijadikan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020 - 2022 (Indonesia Corruption Watch, 2023). Kemudian, menurut BPKP (2023) total kerugian dari dugaan kasus korupsi ini mencapai Rp8.032.084.133.795,51 atau sekitar 8 triliun rupiah. Hal ini tentu saja merugikan keuangan negara dalam skala masif.

Dari kasus ini, kita dapat melakukan analisa bahwa perilaku korupsi yang terdapat pada kasus ini disebabkan oleh beberapa faktor. Dilansir dari Tribun Manado (2023), salah satu faktor penyebab terjadinya kasus korupsi ini adalah kurangnya audit dan pengawasan di Kementerian Kominfo oleh BPKP. Sebabnya, pihak BPKP tidak diizinkan untuk melakukan audit ataupun memberikan mendampingan kepada kementerian kominfo. Karena hal ini, keuangan di Kementerian Kominfo tidak terpantau oleh lembaga penegak hukum terkait dan terciptalah celah untuk melakukan korupsi yang masif ini. Kasus korupsi BTS 4G ini juga merupakan salah satu contoh yang mencerminkan faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan korupsi di Indonesia. Selain faktor yang dipaparkan dalam berita, faktor politik juga dapat menjadi pendorong utama. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Johnny G. Plate (JGP), yang memiliki peran penting dalam proses penentuan pemenang kontrak. Adanya tekanan politik atau intervensi politik dalam pengadaan proyek dapat menciptakan peluang bagi tindakan korupsi, terutama jika pejabat-pejabat tersebut merasa terlalu kuat dan tidak akan dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Selain faktor politik, faktor struktural juga turut berperan dalam kasus ini. Pengadaan proyek infrastruktur besar seperti jaringan telekomunikasi 4G sering melibatkan proses yang kompleks dan birokrasi yang rumit. Hal ini bisa menciptakan celah bagi praktik koruptif, terutama jika tata kelola pemerintahan dan pengawasan lemah. Birokrasi yang bengkok dan kurangnya transparansi dalam proses pengadaan proyek dapat mempermudah tindakan korupsi.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi faktor pendorong. Kasus ini melibatkan jumlah uang yang sangat besar, dengan total kerugian mencapai triliunan rupiah. Potensi keuntungan besar dalam proyek semacam itu dapat mendorong pejabat dan pihak terkait untuk terlibat dalam tindakan korupsi demi memperoleh manfaat pribadi yang signifikan. Dengan demikian, kasus korupsi BTS 4G menggambarkan kompleksitas faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia, yang melibatkan faktor politik, struktural, dan ekonomi yang perlu dipahami dan ditangani dalam upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Mengatasi permasalahan korupsi di Indonesia memerlukan solusi konkret yang berdasarkan pada pemahaman mendalam tentang akar masalah yang telah diidentifikasi. Pertama-tama, penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan transparansi harus menjadi prioritas utama. Reformasi birokrasi, termasuk proses pengadaan proyek seperti kasus BTS 4G, perlu dilakukan dengan mendalam. Hal ini mencakup pemberlakuan aturan yang lebih ketat, peningkatan pengawasan, serta promosi keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari dalam pemerintahan itu sendiri, dengan menegakkan aturan etika dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi.

Selanjutnya, perlu dibentuk lembaga-lembaga penegak hukum yang independen dan kuat. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diberikan kekuatan hukum yang lebih besar dan perlindungan dari tekanan politik. Pengadilan yang bersih dan efisien juga penting untuk memastikan bahwa pelaku korupsi dapat diadili dan dihukum dengan adil. Selain itu, mekanisme whistleblower (pengungkap informasi) yang aman dan efektif perlu didirikan untuk melindungi para pelapor tindakan korupsi. Kemudian, pendidikan dan kesadaran masyarakat juga perlu ditingkatkan. Program-program pendidikan anti-korupsi harus diperkenalkan di sekolah-sekolah untuk mengubah norma sosial terkait korupsi. Masyarakat juga perlu didorong untuk aktif dalam memantau dan melaporkan tindakan korupsi. Solusi konkret ini harus diimplementasikan dengan tekad politik yang kuat dan komitmen penuh dari pemerintah, serta partisipasi aktif dari masyarakat sipil. Pemberantasan korupsi adalah tugas bersama yang memerlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, transparan, dan berintegritas di Indonesia.

KESIMPULAN

Salah satu kasus korupsi yang pernah menggemparkan rakyat Indonesia adalah kasus korupsi BTS 4G yang melibatkan kominfo. Dalam kasus ini, terjadi dugaan korupsi dalam proyek pengadaan infrastruktur jaringan telekomunikasi 4G oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Terdapat tuduhan bahwa sejumlah pejabat dan pihak terkait menerima suap dari perusahaan penyedia layanan telekomunikasi dalam proses penentuan pemenang kontrak. Salah satu orang yang terlibat Johnny G. Plate dijadikan sebagai tersangka dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan 5 BAKTI Kominfo tahun 2020 - 2022. Selain faktor yang dipaparkan dalam berita, faktor politik juga dapat menjadi pendorong utama. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat tinggi, termasuk Johnny G. Plate, yang memiliki peran penting dalam proses penentuan pemenang kontrak.

Adanya tekanan politik atau intervensi politik dalam pengadaan proyek dapat menciptakan peluang bagi tindakan korupsi, terutama jika pejabat-pejabat tersebut merasa terlalu kuat dan tidak akan dipertanggungjawabkan atas tindakan mereka. Selain faktor politik, faktor struktural juga turut berperan dalam kasus ini. Pengadaan proyek infrastruktur besar seperti jaringan telekomunikasi 4G sering melibatkan proses yang kompleks dan birokrasi yang rumit. Hal ini bisa menciptakan celah bagi praktik koruptif, terutama jika tata kelola pemerintahan dan pengawasan lemah. Birokrasi yang bengkok dan kurangnya

transparansi dalam proses pengadaan proyek dapat mempermudah tindakan korupsi. Reformasi birokrasi, termasuk proses pengadaan proyek seperti kasus BTS 4G, perlu dilakukan dengan mendalam. Hal ini mencakup pemberlakuan aturan yang lebih ketat, peningkatan pengawasan, serta promosi keterbukaan dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari dalam pemerintahan itu sendiri, dengan menegakkan aturan etika dan memberikan sanksi yang tegas terhadap pelaku korupsi. Selanjutnya, perlu dibentuk lembaga-lembaga penegak hukum yang independen dan kuat. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi harus diberikan kekuatan hukum yang lebih besar dan perlindungan dari tekanan politik. Pengadilan yang bersih dan efisien juga penting untuk memastikan bahwa pelaku korupsi dapat diadili dan dihukum dengan adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2023). "BPKP Selesai Hitung Kerugian Keuangan Negara Kasus BTS BAKTI Kominfo."
- Hariyani, H. F., Priyarsono, D. F., & Asmara, A. (2016). "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Korupsi Di Kawasan Asia Pasifik". *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 5 (2) 32-44.
- Indonesia Corruption Watch. (2023). "Sinyal Hilang di Kemenkominfo: Usut Tuntas Korupsi Proyek BTS 4G!."
- Setiadi, W. (2018). "KORUPSI DI INDONESIA (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, Serta Regulasi)". *Jurnal Legilasi Indonesia*, Vol. 15 (3) November 2018 : 249-262.
- Sugiyono. (2018). *Metode Peneltian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta
- Tribun Manado. (2023). "Terungkap Penyebab Terjadinya Kasus Dugaan Korupsi BTS 4G, Ternyata BPKP Tak Diizinkan Lakukan Ini.
- Wicaksono, G. S., Prabowo, T. J. W. (2022). "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Korupsi pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Menggunakan Teori Fraud Triangle. *Riset & Jurnal Akuntansi*, E ISSN: 2548-9224, P ISSN: 2548-7507, Vol. 6 (1), Januari 2022.